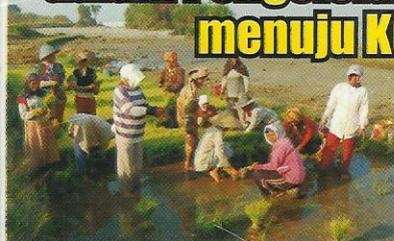


Prosiding



Pengaruh utama Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan



Kerjasama
Fakultas Ekologi Manusia
Institut Pertanian Bogor
dengan
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI

PROSIDING

**PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN MENUJU KUALITAS KEHIDUPAN
BERKELANJUTAN**

Senin, 10 September 2007
Auditorium Rektorat IPB
Bogor, Jawa Barat

Editor:
Dr. Titik Sumarti
Dr. Saharuddin
Dr. Siti Amanah

Desain Cover dan Tata Letak:
Mahmudi Siwi

© Fakultas Ekologi Manusia – IPB, Bogor
Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh
Fakultas Ekologi Manusia – IPB
Bogor, Desember 2007

ISBN: 978-979-15786-1-5

KATA PENGANTAR

Tema "Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan" sengaja diangkat dalam lokakarya yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, mengingat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta lingkungan berkelanjutan sebagai bagian tujuan MGDs. Tema ini menjadi salah satu perhatian Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB sebagai jalan panjang merentas pencapaian delapan tujuan MDGs yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan. Tujuan tersebut yaitu: (i) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (iii) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv) menurunkan angka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu; (vi) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya; (vii) memastikan kelestarian lingkungan hidup dan (viii) membangun kemitraan global untuk pembangunan (Bappenas, 2005).

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan perempuan Indonesia yang menunjukkan kemajuan yang tidak berarti. Untuk Indonesia, Angka Human Development Index (HDI), angka Gender-Related Development Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8; 59,2 dan 54,6. Tingginya angka HDI dibandingkan dengan angka HDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia menempati peringkat ke- 90 jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara Asean (Bappenas 2005).

Oleh karena itu, lokakarya yang dilaksanakan oleh FEMA IPB bertujuan untuk: (1) Membangun kesadaran Pengarusutamaan Gender (PUG) di kalangan Civitas Akademika IPB; (2) Memaparkan hasil-hasil penelitian, pemberdayaan masyarakat, dan pemikiran orisinal staf pengajar, mahasiswa, dan mitra kerja Fakultas Ekologi Manusia-IPB tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan; dan (3) Menghasilkan pemikiran inovatif dalam strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Alhamdulillah, acara lokakarya dihadiri oleh 152 peserta selain panitia pelaksana yang berasal dari lingkungan Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, dan LSM yang telah menjadi mitra kerja FEMA IPB. Lokakarya ditindaklanjuti dengan adanya diskusi kelompok terbatas sebanyak 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) kelompok kemiskinan, UKM dan kesehatan; (2) kelompok pendidikan; (3) kelompok lingkungan. Adapun hasil dari lokakarya dan diskusi kelompok kami wujudkan dalam sebuah dokumen prosiding ini.

Terimakasih kepada Prof. Dr. Meutia Hatta Swasono, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI yang telah menjadi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini sekaligus berkenan memberikan sambutan dan membuka acara lokakarya. Kami berharap kemitraan dengan IPB tetap terjalin dengan baik di masa datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada para pemakalah/pembicara, moderator, penulis makalah diskusi, segenap peserta dan panitia, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Rektor IPB yang telah memberikan sambutan dan memfasilitasi suksesnya kegiatan ini. Juga terimakasih kepada Dr. Titik Sumarti dan Dr. Saharuddin, yang telah mendukung suksesnya lokakarya dan terwujudnya prosiding ini. Kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Siti

Amanah, dan Mahmudi Siwi yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini. Rasa syukur tak terhingga kami panjatkan kehadiran Illahi yang telah memberi, tenaga, pikiran, kesempatan dan kesehatan sehingga kegiatan dan prosiding ini dapat diwujudkan.

Bogor, Desember 2007

Prof. Dr. Ir. HAM. Hardinsyah, MS
Dekan FEMA IPB

**SAMBUTAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PADA
LOKAKARYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN MENUJU
KUALITAS KEHIDUPAN BERKELANJUTAN**

Kampus IPB Darmaga, Bogor, Senin, 10 September 2007

Yang terhormat
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan beserta Staf
Pimpinan di lingkungan Rektorat dan Fakultas di IPB
Guru Besar dan Dosen IPB
Mitra Kerja Gender -- FEMA IPB
Undangan, dan para mahasiswa yang berbahagia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

Alhamdulillah wasyukurillah walahaulawala kuata illa billah

Pada hari yang penuh rahmat ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha pengasih dan penyayang, karena atas ridha-nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam suasana yang penuh keakraban untuk bersama-sama mengikuti lokakarya "Pengurusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan".

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang kami cintai, Pertanian, Pendidikan, dan Pemberdayaan Perempuan merupakan rangkaian kata yang sulit dipisahkan. Perempuan mempunyai peran penting dalam pembangunan pangan dan pertanian; bahkan perempuan juga mempunyai peran penting dalam pembangunan pendidikan sejak usia dini. Salah satu dari tujuan pembangunan millennium (MDGs) adalah Meningkatkan Kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan (*Promote Gender Equality and Empower Women*), yang berkaitan erat dengan tujuan-tujuan MDGs lainnya seperti mengatasi kemiskinan dan kelaparan, mencapai ajib belajar, menurunkan kematian, memperbaiki kesehatan ibu, pengendalian penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan akan semakin mempermudah pencapaian MDGs.

Laporan bank Dunia pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa Negara sedang berkembang proses pencapaian tujuan MDGs tersebut masih jauh dari harapan, yang disebut Bank Dunia sebagai *off Track*. Indonesia saat ini masih menghadapi masalah serius tentang kemiskinan, pengangguran, kekurangan gizi, penyakit menular, kematian anak, dan berbagai ketimpangan sosial. Selain itu juga terjadi fenomena alam yang tidak bersahabat, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor, semburan lumpur panas. Masalah tersebut tidak semata karena bencana alam tetapi juga akibat kesalahan manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan terutama bagi golongan kurang mampu di pedesaan yang kehidupannya bertumpu pada sektor pertanian.

Hadirin yang saya hormati.

Sumberdaya manusia yang berkualitas, termasuk perempuan, sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya manusia berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui proses pendidikan berkualitas. Pembangunan pendidikan adalah elemen penting dalam memajukan dan mensejahterakan suatu bangsa. Sebaiknya, pembangunan pendidikan kedepan adalah pendidikan yang dapat menjamin kualitas kehidupan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek sosial (manusia beserta segenap nilai dan interaksinya termasuk dalam konteks pendidikan, kesehatan dan kelembagaan), aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi secara seimbang. Dalam konsep *triple bottom lines* disebut kesatuan 3P, yaitu *People, Planet, and Profit*.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia adalah hasil konstruksi sosial masyarakat. Pembangunan pendidikan kita cenderung membaik tetapi masih timpang dan belum menguntungkan sebagian golongan, terutama kaum miskin dan perempuan. Oleh karena itulah akses dan kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan dalam pendidikan harus diperjuangkan agar keadilan gender dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan dapat terwujud. Dengan demikian sumberdaya manusia berkualitas, baik laki-laki maupun perempuan, dapat membangun pertanian secara berkelanjutan.

Hadirin sekalian,

Institut Pertanian Bogor sebagai perguruan tinggi bidang pertanian akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tingginya agar dapat berpartisipasi aktif dalam mengatasi permasalahan bangsa. IPB sejak tahun 1974 telah mengembangkan cara penjangkauan calon mahasiswa (jalur USMI) dari seluruh pelosok tanah air, termasuk perempuan dari golongan ekonomi yang tidak mampu tetapi berprestasi. Bahkan sejak lima tahun terakhir IPB mengembangkan jalur BUD (Beasiswa Utusan Daerah), bagi putra-putri daerah berprestasi yang dibiayai oleh PEMDA dan diharapkan kembali ke daerahnya setelah lulus.

Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) partisipasi perempuan masuk IPB lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, bahkan cenderung semakin meningkat, berturut-turut 57%, 58%, dan 61% pada tahun 2005, 2006 dan 2007. Apakah hal ini sudah mencerminkan terjadinya kesetaraan gender di tingkat pendidikan tinggi di Indonesia? Hal ini tentu perlu dikaji lebih mendalam.

Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB adalah fakultas termuda yang dimiliki IPB dan yang pertama di Indonesia, dan merupakan wujud komitmen IPB untuk melakukan secara terus-menerus perubahan melalui inovasi pengetahuan dan teknologi agar tercapai kondisi yang lebih baik. Sekedar catatan bahwa FEMA juga mengembangkan pendidikan yang sadar gender, yang diindikasikan oleh Wakil Dekan, Kepala Jaminan Mutu dan Pendidikan dan salah seorang Ketua Departemen-nya adalah perempuan. FEMA mengembangkan keilmuan berbasis ekologi manusia, yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia – kebudayaannya – dengan lingkungan hidup disekitarnya, serta memiliki tiga departemen yaitu Gizi Masyarakat, Ilmu Keluarga dan Konsumen, serta Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dalam disiplin-disiplin ilmu itulah pendidikan gender diintegrasikan ke dalam kurikulum, dan kemudian dapat diambil pula sebagai mata kuliah minor atau penunjang oleh para mahasiswa program mayor lainnya.

Sehubungan hal tersebut, kami menyambu baik upaya kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB dalam memprakarsai kegiatan lokakarya ini. Hal ini kami anggap sebagai langkah awal dari kerjasama selanjutnya dalam mengintegrasikan gender dalam kebijakan dan program pembangunan termasuk didalamnya pembangunan pendidikan.

Hadirin sekalian,

Harapan saya dari hasil lokakarya ini adalah kesadaran gender di lingkungan civitas akademika IPB semakin meingkat sehingga dapat membuat proses pendidikan yang lebih adil bagi laki-laki dan perempuan. Disamping itu kita berharap kesadaran gender tersebut terus bergulir dikembangkan alumni, yang merupakan bagian dari *agen of change*, dimanapun alumni berada nantinya. Lebih dari itu kita harapkan mampu mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi seluruh mahluk di bumi yang kita cintai ini. Amien.

Bogor, 10 September 2007

Rektor IPB

Prof. Dr. Ir. H. A. Anshori Mattjik, MSc

GAGASAN INTEGRASI PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM RENCANA STRATEGIS FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA IPB

TITIK SUMARTI¹

PENDAHULUAN

Mengapa perempuan dipentingkan dalam pendidikan? Jika memang demikian adanya bukankah ini sebuah diskriminasi terhadap laki-laki? Pertanyaan tersebut saya kutip dari prolog jurnal perempuan edisi Perspektif Gender dalam Pendidikan, yang ditulis oleh Arivia (2002). Hal ini tak ada bedanya ketika kita mempertanyakan mengapa kesetaraan gender penting dalam pengembangan pendidikan? Kita sepakat bahwa pendidikan adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat, apalagi jika taruhannya adalah kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa.

Masalahnya adalah, pendidikan bukanlah sesuatu yang bebas nilai. Ia merupakan hasil konstruksi sosial. Dalam konstruksi sosial masyarakat Indonesia, ada golongan masyarakat yang tidak selalu diuntungkan dengan konstruksi tersebut. Mereka, sebut saja sebagai golongan yang termarginalkan, sebagian besar adalah kaum miskin dan mahluk perempuan. Effendi (2007) dalam tulisannya tentang Indonesia menghadapi liberalisasi pendidikan tinggi, menyampaikan bahwa sebagai negara yang memiliki 210 juta penduduk dan tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara ekportir jasa pendidikan dan pelatihan. Hal ini dikarenakan perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih rendah. Secara umum mutu pendidikan nasional kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, jauh tertinggal dari standar mutu internasional. Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk “mengundang” masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke Indonesia. Selanjutnya sudah bisa kita duga bahwa dampak dari konstruksi liberalisasi pendidikan tinggi adalah semakin hilangnya akses kaum miskin dan mahluk perempuan pada pendidikan.

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) sudah menjadi isu penting dan menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia sehingga seluruh negara menjadi terikat dan melaksanakan komitmen tersebut. Namun demikian untuk mencapai KKG masih banyak masalah yang dihadapi utamanya adalah masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan masih adanya berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Berdasarkan Human Development Report 2006, angka HDI (*Human Development Index*) Indonesia adalah 71,1 yang menempati peringkat ke 108 dari 177 negara. Angka GDI (*Gender related Development Index*) Indonesia adalah 70,4 yang menempati peringkat 81 dari 140 negara (UNDP, 2006).

¹ Staf Pengajar Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA IPB. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB periode 2005-2009

Demikian pula angka GEM (*Gender Empowerment Measured*) Indonesia adalah 54,6 yang menempati peringkat ke 33 dari 71 negara (UNDP, 2005). Perbedaan angka HDI dibandingkan dengan angka GDI menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan pembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Sementara itu, rendahnya angka GEM menunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Oleh karena itu diperlukan *political will* yang kuat agar semua kebijakan dan program pembangunan, termasuk pendidikan, memperhitungkan kesetaraan dan keadilan gender, serta peduli anak sesuai dengan Rencana Kebijakan Jangka Menengah Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2005-2009.

Sementara itu, Konferensi Dunia Perempuan ke IV yang berlangsung tanggal 4-15 September 1995 menghasilkan rumusan gagasan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) dalam pembangunan, yang bersifat mengikat negara-negara anggota PBB. Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi untuk mengintegrasikan isu-isu gender dalam formulasi analisis, kebijakan monitoring, program dan proyek, guna dapat meningkatkan akses dan kontrol kaum perempuan atas sumber daya ekonomi, politik, sosial dan budaya. Strategi tersebut terfokus pada 12 bidang kritis yang harus segera ditangani dalam pembangunan, yaitu: kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, konflik senjata, partisipasi ekonomi, kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, hak-hak asasi, media massa, lingkungan, dan anak-anak perempuan. Rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan Rekomendasi Deklarasi Beijing dan Landasan Aksi (*Beijing Declaration and Platform of Action*).

Sejalan dengan itu, pada bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB bersepakat untuk menghimpun komitmen para pemimpin dunia dalam rangka menangani isu perdamaian, keamanan, pembangunan, hak asasi dan kebebasan fundamental. Pada pertemuan tersebut dicetuskan untuk merumuskan Tujuan Umum Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan. Tujuan pokok MDGs adalah: (i) Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan; (ii) Mencapai Pendidikan Dasar untuk semua; (iii) Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; (iv) Menurunkan Angka Kematian Anak; (v) Meningkatkan Kesehatan Ibu; (vi) Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit lainnya; (vii) Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup dan terakhir (viii) Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan (Bappenas,2005).

Pendidikan ke depan adalah pendidikan yang menjamin terwujudnya kualitas kehidupan berkelanjutan. Dari dimensi ekonomi, kebanyakan para ahli ekonomi pembangunan yakin bahwa pembentukan modal manusia adalah penting, bahkan sentral bagi usaha pembangunan di negara miskin (Herrick dan Kindleberger, 1988). Pendidikan dipandang sebagai suatu investasi pada modal manusia, agar dapat menciptakan teknologi dan mentransfer teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan agar tercapai peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Masalahnya, peningkatan ekonomi belum dapat menjamin tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat bahkan kesejahteraan seluruh makhluk hidup di bumi (manusia, tanaman dan hewan). Oleh karena itu, dimensi pengembangan masyarakat dan lingkungan penting dimasukkan sebagai elemen pembangunan berkelanjutan. Prasyarat tercapainya pembangunan berkelanjutan adalah bahwa aspek ekologi, ekonomi dan sosial harus berada dalam sebuah keseimbangan tanpa saling mendominasi (Munasinghe, 1993). Dengan demikian, pendidikan dipandang sebagai proses pembelajaran bersama, bahkan proses pengembangan kesadaran kritis dan mendapatkan pengalaman hidup

yang lebih bermakna dengan cara berkeadilan dan manusiawi serta luwes terhadap perubahan agar tercapai kesejahteraan mahluk hidup dan bumi tetap terjaga dengan baik.

Institut Pertanian Bogor sebagai lembaga pendidikan tinggi juga telah belajar dari pengalaman hidup yang dialami bangsa Indonesia saat ini. Mattjik (2007) menyampaikan bahwa Institut Pertanian Bogor sebagai perguruan tinggi bidang pertanian akan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas penyelenggaraan perguruan tingginya agar dapat berperan serta lebih aktif dalam turut serta mengatasi permasalahan bangsa, baik dalam penyediaan sumberdaya manusia, menghasilkan produk dan teknologi yang handal, serta konsep-konsep pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, IPB harus melakukan perubahan terus menerus untuk menuju kondisi yang lebih baik dan untuk mencapai *academic excellence*.

Merujuk pada Keputusan Rektor IPB Nomor 112/K13/OT/2005, dikatakan bahwa pembentukan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) di IPB merupakan yang pertama di Indonesia dan telah memberikan sentuhan dan inovasi pendidikan yang "luar biasa" (Renstra FEMA IPB, 2006-2009). Perilaku inovatif pendidikan dimulai dari sikap kritis terhadap kondisi yang ada sampai pada usaha menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. Pembentukan FEMA merupakan cerminan adanya perilaku yang inovatif terhadap dunia pendidikan tinggi, dimana pengkajian keilmuan FEMA terfokus pada gizi, kesehatan dan ketahanan pangan, kesejahteraan keluarga, komunikasi dan pengembangan masyarakat melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat.

Sikap inovatif yang melahirkan FEMA tersebut dipicu oleh perkembangan IPB menuju status pendidikan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang mengharapkan adanya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mampu mengelola dan mengembangkan asset dengan kewenangan penuh mengatur diri sendiri. Dengan demikian, FEMA akan terus mengembangkan diri melalui Rencana Strategis (Renstra) yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada.

Menilik tujuan pembangunan yang tersurat pada MGDs dimana saat ini manusia menjadi fokus pembangunan dan berdasarkan rumusan strategi Konferensi Dunia Perempuan ke IV dimana pembangunan manusia diartikan sebagai pembangunan yang tidak bias gender, maka IPB sebagai lembaga pendidikan tinggi dan FEMA-IPB yang mengembangkan keilmuan ekologi manusia perlu mengakomodir gagasan pembangunan manusia yang mengarusutamakan gender dalam menyelenggarakan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tersebut dilakukan untuk pengembangan kualitas manusia dan tercapainya kualitas kehidupan berkelanjutan.

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN, SUMBERDAYA MANUSIA DAN KUALITAS KEHIDUPAN BERKELANJUTAN

Undang-undang No. 20 tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan nasional bertujuan meniscayakan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Bangsa yang cerdas dan mampu menjadi manusia seutuhnya adalah bangsa yang dapat memajukan dan mensejahterakan bangsanya. Oleh karena itulah pembangunan pendidikan memainkan peranan penting dalam mentransformasikan partisipan pasif dan perempuan menjadi subyek sekaligus aktor dalam proses pembangunan.

Pada saat ini pendidikan nasional masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang menonjol, yaitu: (1) masih rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, (3) masih lemahnya manajemen pendidikan, dan (4) belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademisi (Yurliani dkk, 2004). Berdasarkan permasalahan tersebut maka kebijakan program pembangunan pendidikan diarahkan pada:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Indikator untuk pendidikan tinggi mencakup: (1) meningkatnya Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan tinggi menjadi 15 persen, (2) meningkatnya kapasitas tampung terutama untuk bidang-bidang yang menunjang kemajuan ekonomi, penguasaan sains dan teknologi, (3) meningkatnya peran swasta melalui perguruan tinggi swasta, (4) meningkatnya beasiswa bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, (5) tercapainya penyebaran kapasitas pendidikan tinggi secara geografis untuk mendukung pembangunan daerah, (6) meningkatnya anggaran pendidikan tinggi secara bertahap.
2. (a) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
(b) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keragaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.
(c) Mengembangkan kualitas sumberdaya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh, melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya. Indikator untuk pendidikan tinggi mencakup: (1) tersedianya program studi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional (termasuk ilmu keagamaan dan keguruan), (2) meningkatnya kualitas tenaga kependidikan dan makin tingginya proporsi dosen berpendidikan S2/S3, (3) tersempurnakannya kurikulum yang sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, dan global, (4) meningkatnya kualitas dalam bidang penelitian, (5) meningkatnya hasil penelitian perguruan tinggi yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan dunia usaha.
3. (a) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
(b) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
(c) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Indikator untuk pendidikan tinggi mencakup: (1) meningkatnya jumlah perguruan tinggi negeri yang melakukan otonomi, (2) meningkatnya mekanisme kerjasama yang jelas antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan masyarakat pengguna hasil perguruan tinggi, (3) meningkatnya kualitas sistem akreditasi di lingkungan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara teratur, efisien dan efektif, (4) tersusunnya peraturan perundang-undangan untuk menertibkan lembaga pemberi gelar dan jabatan akademik, (5)

meningkatkan kemampuan evaluasi diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan perencanaan pengembangan perguruan tinggi.

4. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumberdaya lokal.

Berdasarkan arahan kebijakan dan program pembangunan pendidikan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini dapat dilihat dari gambaran pembangunan pendidikan di Indonesia yang kelihatannya telah cukup menggembirakan. Dalam laporan perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium Indonesia (UNDP, 2005) dikemukakan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan dalam meningkatkan kesetaraan dan keadilan pendidikan bagi penduduk laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan semakin membaiknya rasio partisipasi pendidikan dan tingkat melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki, kontribusi perempuan dalam sektor non pertanian, serta partisipasi perempuan di bidang politik dan legislatif.

Dalam hal akses ke pendidikan, terdapat kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar, namun di tingkat sekolah lanjutan pertama justru proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara di tingkat sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi akses perempuan masih terbatas. Di tingkat perguruan tinggi, rasio angka partisipasi perempuan terhadap laki-laki meningkat dari 85,1 persen pada 1992 menjadi 92,8 persen pada 2002, namun terjadi penurunan pada 1997 dan 1998 pada saat krisis ekonomi. Hal ini diduga berhubungan dengan menurunnya kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan.

Kesenjangan tingkat melek huruf laki-laki dan perempuan semakin kecil, yang ditunjukkan oleh meningkatnya rasio angka melek huruf penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki usia 15-24 tahun, yaitu dari 97,9 persen pada 1990 menjadi 99,8 persen pada 2002. Namun apabila kelompok penduduk usia di atas 24 tahun diperhitungkan, maka tingkat kesenjangan melek huruf penduduk laki-laki dan perempuan semakin lebar.

Kontribusi penduduk perempuan dalam pekerjaan upahan (*wage employment*) untuk sektor non pertanian mengalami peningkatan dari 28,3 persen pada 1996 menjadi 37,6 persen pada 1998. Namun sejak 1998 kontribusi perempuan menurun dari tahun ke tahun hingga menjadi 28,2 persen pada 2002. Hal ini diduga berhubungan dengan krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang lebih banyak terjadi pada pekerja perempuan. Sementara berdasarkan data BPS tentang penduduk usia 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan dan jenis kelamin pada 2000 ternyata kaum perempuan juga sangat dirugikan karena sebagian besar dari mereka adalah pekerja yang tidak dibayar (39,0 persen).

Terkait dengan anggaran pendidikan, Bappenas (2006) mengemukakan bahwa anggaran pembangunan pendidikan belum tersedia secara memadai. Dengan adanya amandemen UUD 1945 dan ditetapkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan agar dana pendidikan, selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan minimal 20 persen dari APBD, serta mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa memungut biaya, anggaran pendidikan pada tahun 2004 mendapat porsi yang lebih besar lagi. Namun demikian anggaran tersebut baru mencapai 21,5 persen dari anggaran pembangunan keseluruhan atau 6,6 persen dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Dalam kurun waktu 1999-2001, berdasar data *Human Development Report* 2004 Indonesia hanya mengalokasikan sebesar 1,3 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk pendidikan, sementara Malaysia, Thailand dan Filipina secara berturut-turut telah mengalokasikan 7,9 persen, 5,0 persen, dan 3,2 persen dari PDB.

Pembangunan pendidikan yang belum optimal dalam mencapai peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tentu akan berpengaruh pada perkembangan bangsa. Bukti sejarah perjalanan bangsa-bangsa menunjukkan bahwa maju mundurnya suatu negara bangsa amat ditentukan oleh keunggulan kualitas SDM warganya. Banyak negara bangsa yang kaya sumber daya alam (SDA)-nya yang justru menjadi obyek eksploitasi negara lain. Sementara di sisi lain, banyak negara yang memiliki SDA terbatas, namun memiliki SDM yang baik mampu mencapai kesejahteraan yang tinggi (Husodo, 2006).

Upaya peningkatan maupun perbaikan kualitas sumberdaya manusia tersebut melibatkan banyak dimensi, selain pendidikan, masih ada dimensi gizi dan kesehatan, kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup. Harus diakui, elemen pentingnya adalah pendidikan, dalam arti penguasaan ilmu pengetahuan yang maju, manajemen yang andal dan teknologi tinggi serta memiliki nilai-nilai luhur moralitas. Dimensi gizi dan kesehatan serta kesejahteraan dalam perbaikan kualitas sumberdaya manusia semakin terasa penting ketika suatu bangsa menghadapi situasi yang sulit. Seperti dialami bangsa Indonesia sepuluh tahun terakhir, krisis ekonomi ditambah naiknya harga BBM telah meningkatkan angka kemiskinan, dan kualitas gizi masyarakat juga menurun drastis. Dimanapun, kualitas SDM ditentukan oleh kualitas pangan yang dikonsumsi rakyat yang akan menentukan tingkat pertumbuhan fisiknya termasuk kecerdasannya, disamping peningkatan pendapatan, pendidikan dan layanan kesehatan yang baik. Dimensi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perbaikan kualitas sumberdaya manusia terkait dengan issue-isue kemiskinan, ketidakadilan gender dan lemahnya ketahanan keluarga, ketidakberdayaan masyarakat dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Oleh karena itulah, berbagai dimensi tersebut perlu diintegrasikan sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menyiapkan sumberdaya manusia berkualitas.

Kesatuan yang utuh antar dimensi-dimensi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat dikerangkai dalam konsep kualitas kehidupan berkelanjutan, dimana dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial (pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat) berada dalam keseimbangan. Sumberdaya manusia yang berkualitas akan dapat mewujudkan kualitas kehidupan berkelanjutan dan mencapai kesejahteraan bangsa dan makhluk hidup lainnya. Demikian pula sebaliknya, dengan mengembangkan kualitas kehidupan berkelanjutan maka akan tercapai peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI BIDANG PENDIDIKAN

Upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam kebijakan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 th. 2000 tentang Program Pembangunan Nasional-PROPENAS 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan nasional, sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Merujuk pada "Pedoman Pengarusutamaan Gender" dalam Pembangunan Nasional, dikemukakan bahwa seluruh pimpinan lembaga pemerintah pada tingkat nasional dan daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam lingkup kewenangan masing-masing sesuai tugas, fungsi dan tingkat otoritasnya, serta mengevaluasi hasil dari aktivitas mereka. Temuannya akan dihimpun oleh keterwakilan-keterwakilan dan institusi-institusi yang bertanggungjawab yang kemudian disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kementerian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Dalam Negeri.

Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender bukanlah kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Dengan

demikian gender dapat dikatakan sebagai pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki. Berbagai pembedaan peran, fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kedudukan antara laki-laki dan perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidakadilan karena telah berakar dalam adat, norma ataupun struktur masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender antara lain: marginalisasi, subordinasi, pandangan stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Oleh karena itulah perlu upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (Kantor MNPP-RI, 2002).

Apa itu kesetaraan dan keadilan gender? Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki (Kantor MNPP-RI, 2002).

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas cara penggunaan dan hasil sumber daya, sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan.

Apa itu pengarusutamaan gender? Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan diperlukan strategi. *Gender mainstreaming* (GMS) atau pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menciptakan kesetaraan gender, mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, sampai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Integrasi gender tersebut melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

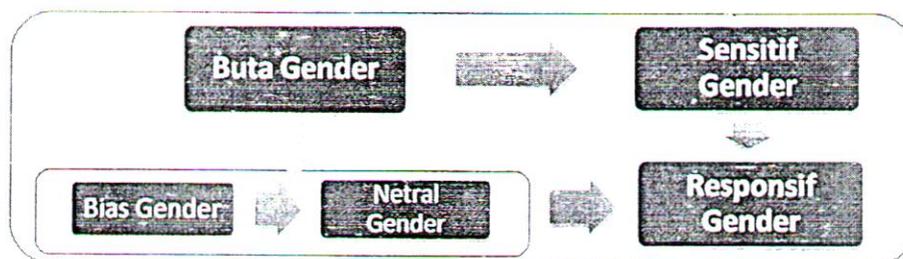
Bagaimana upaya mengarusutamakan gender? (1) gender harus diintegrasikan dalam seluruh tahap siklus proyek/program dengan memperhatikan kondisi awal tertentu sebelum melakukan PUG, (2) untuk melaksanakan PUG maka diperlukan alat analisis gender dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan, mencakup akses, partisipasi, kontrol dan manfaat, (3) agar penyelenggaraan PUG efektif maka komponen analisis harus diintegrasikan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, (4) selain kebijakan normatif, maka pembangunan responsif gender juga memerlukan tersedianya anggaran dan terciptanya infrastruktur birokrasi yang memungkinkan kebijakan ini secara mekanistik dapat diselenggarakan, (5) dalam pelaksanaan PUG komponen kegiatan pemantauan dan evaluasi sangat penting.

Selanjutnya, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 132 tahun 2003, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah, menetapkan ketentuan umum sebagai berikut (Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias, 2006):

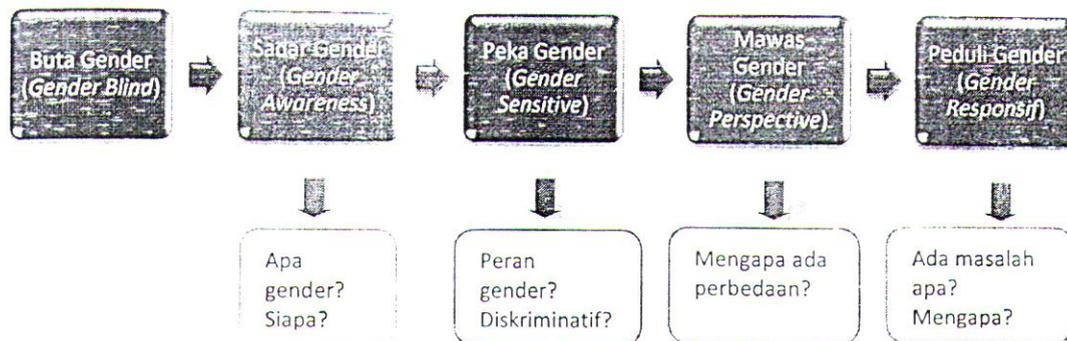
1. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek, dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
3. Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu kondisi yang adil dan setara dalam hubungan kerjasama antara perempuan dan laki-laki.
4. Analisis gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Mengapa gender penting dalam pendidikan? Pendidikan merupakan kunci utama meningkatkan status perempuan. Isu-isu utama yang dikemukakan oleh ADB (2005) adalah bahwa: (1) agar bisa berpartisipasi penuh dalam masyarakat, kaum perempuan dan kaum miskin harus memiliki akses yang sama terhadap kesempatan mendapatkan pendidikan, (2) perbaikan buku teks dan kurikulum terhadap stereotipe gender, (3) pelatihan para guru perempuan, (4) sikap sosial terhadap pendidikan dan nilai-nilai yang menyertai terhadap pendidikan laki-laki dan perempuan, (5) seberapa luas perempuan memegang posisi pembuat keputusan dalam struktur pendidikan?, (6) apakah kaum perempuan miskin mendapat informasi mengenai berbagai peluang dalam pendidikan nonformal dan apakah mereka didorong untuk berpartisipasi? (7) Apakah tersedia fasilitas yang layak (misalnya akomodasi asrama yang aman bagi perempuan, fasilitas belajar untuk perempuan apabila norma budaya memisahkan tempat belajar anak laki-laki dengan perempuan) dalam lembaga-lembaga pendidikan tinggi sehingga memungkinkan bagi kaum perempuan untuk bersekolah?

Selanjutnya bagaimana strategi utama mendorong agar pembangunan pendidikan berkesetaraan dan berkeadilan gender? Untuk membangun kerangka kebijakan pembangunan pendidikan yang responsif gender, langkah awal adalah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada seluruh aparat pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran gender, yang merupakan modal dasar bagi tersusunnya kebijakan yang responsif gender. Pola ini dapat digambarkan melalui skema perubahan kawasan belajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik) dan perilaku, sebagai berikut (dikutip dari Departemen Kehutanan, 2004):



Gambar 1. Skema perubahan kawasan belajar (kognitif, afektif, dan psikomotorik)



Gambar 2. Skema perubahan perilaku

Departemen Pendidikan Nasional secara terencana telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender bidang Pendidikan. Bagaimana mengkaji bahwa kebijakan pembangunan pendidikan telah responsif gender? Untuk itu diperlukan alat analisis gender yang mencakup: akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol, dan diterapkan pada tiga aspek kebijakan pendidikan, yaitu (Depdiknas, 2004):

- (1) Akses dan pemerataan pendidikan, yang mencakup indikator: angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), angka buta aksara/angka melek aksara.
- (2) Mutu dan relevansi pendidikan, yang mencakup indikator: angka putus sekolah, angka mengulang kelas, proporsi siswa perempuan terhadap siswa laki-laki menurut satuan pendidikan, program studi pada jenis pendidikan kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi.
- (3) Manajemen pendidikan, yang mencakup indikator: proporsi perempuan dan laki-laki dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, merujuk pada ADB (2005) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi, agar responsif gender adalah: (1) tetapkan sistem kuota bagi mahasiswi pada pendidikan tinggi, (2) tetapkan sistem kuota bagi kaum perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, dengan menawarkan dana dan insentif lainnya, (3) tetapkan rencana tindakan dan program-program lain untuk mendorong mahasiswi untuk mengikuti kursus (mata kuliah) matematika dan sains, (4) kembangkan peluang untuk menjadi staf dan pastikan bahwa proporsi tertentu disediakan untuk kandidat perempuan, (5) sediakan dukungan (fasilitas pelatihan yang memadai, beasiswa dan dana dll) yang diperlukan bahwa terdapat tempat yang disediakan untuk kaum perempuan dalam program pengembangan staff, (6) Berikan pelatihan mengenai dasar-dasar menjadi pembimbing (*counselor*) dalam konseling peka-gender.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN FEMA - IPB

Penyelenggaraan fakultas secara khusus diatur dalam PP No. 60 Tahun 1999 yang berpedoman pada: 1) tujuan pendidikan nasional; 2) kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan; 3) kepentingan masyarakat serta; 4) perhatian minat, kemampuan dan prakarsa pribadi, yang berarti dalam penyusunan Resntra FEMA haruslah merujuk pada peraturan tersebut.

Analisis gender terhadap kebijakan pembangunan pendidikan dalam lingkup FEMA-IPB dilakukan terhadap beberapa dokumen seperti panduan program sarjana IPB, renstra 2006-2009 FEMA, laporan tahunan FEMA 2006, serta data penunjang lainnya. Hasil analisis disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Kebijakan Pembangunan Pendidikan Tinggi FEMA-IPB

No	Kebijakan	Uraian	Hasil
1.	Renstra Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor Tahun 2006-2009.	<ul style="list-style-type: none"> • Visi : “Menjadi lembaga pendidikan tinggi bertaraf internasional dalam pengembangan sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis pada paradigma ekologi, dengan kompetensi utama di bidang ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat, untuk pengembangan kualitas manusia”. • Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang ekologi manusia, dengan kompetensi utama ilmu gizi, ilmu keluarga, dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat. 2. Mengembangkan ipteks yang ramah lingkungan melalui penelitian mutakhir di bidang ekologi manusia, dengan fokus pada ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat. 3. Menerapkan dan mendayagunakan ipteks ekologi manusia untuk mencapai kualitas kehidupan yang sehat, cerdas, produktif dan berkelanjutan. • Tujuan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan pendidikan tinggi yang berkualitas di bidang ekologi manusia dengan kompetensi ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat. 2. Menghasilkan ipteks yang mutakhir dan ramah lingkungan di bidang ekologi manusia, dengan fokus pada ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat. 3. Memberikan kontribusi akademik dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang sehat, cerdas, produktif dan berkelanjutan. • Sasaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan jejaring kerjasama dan kemitraan akademik dengan perguruan tinggi yang diakui di luar negeri, kualitas pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat berbasis departemen meningkat, serta kualitas SDM, manajemen dan fasilitas meningkat. 	<p>Netral Gender</p>

No	Kebijakan	Uraian	Hasil
		<p>2. Penyelenggaraan penelitian unggulan FEMA berbasis paradigma ekologi/holistik, peran laboratorium fisik dan sosial dalam pendidikan dan pengembangan ilmu meningkat, serta perpustakaan berkembang dan publikasi meningkat.</p>	Netral Gender
		<p>3. Penyelenggaraan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat lokal, regional maupun global, serta diseminasi inovasi pengetahuan dan teknologi untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kekurangan gizi dan kelaparan, serta krisis ekologi dan etika meningkat.</p>	Netral Gender
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Umum : "Membangun FEMA berkualitas dan mendapatkan pengakuan internasional dari segi kegiatan akademik, kualitas lulusan dan karya inovasi dengan fokus utama di bidang ilmu gizi, ilmu keluarga dan konsumen, serta ilmu komunikasi dan pengembangan masyarakat". 	Netral Gender
		<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Mutu : "Dengan komitmen tinggi terhadap mutu, FEMA secara efisien dan akuntabel menghasilkan lulusan, dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berbasis pada paradigma ekologi, untuk kualitas kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan". 	Netral Gender
		<ul style="list-style-type: none"> • Strategi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sinergi jejaring kerjasama. 2. Pengembangan ipteks yang berbasis pada paradigma ekologi. 3. Pengembangan SDM, manajemen dan fasilitas. 	Netral Gender
		<ul style="list-style-type: none"> • Program : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perintisan jejaring kerjasama dan kemitraan akademik dengan perguruan tinggi yang diakui di luar negeri. 	Netral Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat berbasis departemen. 	Netral Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan kualitas SDM, manajemen dan fasilitas. 	Netral Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Perintisan penelitian unggulan FEMA berbasis paradigma ekologi/holistik. 	Netral Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan peran laboratorium fisik dan sosial dalam pendidikan dan pengembangan ilmu. 	Netral Gender
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pengembangan perpustakaan dan peningkatan publikasi. 	Netral Gender

No	Kebijakan	Uraian	Hasil
		7. Peningkatan jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat lokal, regional maupun global.	Netral Gender
		8. Peningkatan diseminasi inovasi pengetahuan dan teknologi.	Netral Gender

Hasil analisis gender pada kebijakan pembangunan pendidikan FEMA-IPB menunjukkan bahwa rencana strategis yang disusun FEMA sebagai pedoman kerja empat tahun ke depan (2006-2009) masih netral gender dan belum mengarah pada pembangunan kualitas manusia yang responsif gender. Dengan kata lain, strategi pembangunan pendidikan yang diterapkan FEMA belum mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam kebijakan dan program pembangunan pendidikan tinggi untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam rangka menciptakan kesetaraan gender. Dua pertanyaan yang bisa dimunculkan adalah: (1) apakah pembelajaran gender di lingkungan FEMA masih pada kawasan kognitif dan afektif saja?, (2) apakah perubahan perilaku gender di lingkungan FEMA baru sampai tahap sadar dan peka gender?

PROFIL GENDER PENDIDIKAN

1. Akses dan Pemerataan Pendidikan

Di tingkat nasional telah terjadi kemajuan yang berarti dalam mencapai kesetaraan gender di bidang pendidikan. Berdasarkan Rasio Angka Partisipasi Masuk (APM) perempuan terhadap laki-laki pada tiap jenjang pendidikan tahun 1995-2002 menunjukkan bahwa terdapat kesetaraan gender di tingkat sekolah dasar, namun di tingkat sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi partisipasi perempuan relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki (UNDP, 2005).

Di tingkat nasional, faktor yang menghambat partisipasi perempuan di sekolah lanjutan atas dan perguruan tinggi diduga adalah jumlah sekolah yang terbatas dan jarak tempuh yang jauh, perkawinan dini, serta krisis ekonomi yang menurunkan kemampuan keluarga untuk membiayai pendidikan. Di IPB terjadi sebaliknya, angka partisipasi masuk perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Angka Partisipasi Masuk IPB (perkembangan tiga tahun) menurut jalur masuk dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2. Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Masuk (APM) perempuan di IPB selama tiga tahun terakhir pada umumnya lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki, bahkan cenderung semakin meningkat. (Pada angkatan 2007/2008 60,8 persen mahasiswa IPB adalah perempuan). Jika diamati dari jalur masuk IPB yaitu jalur USMI, SPMB, BUD dan lainnya (PIN dan Alih Jenjang) menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana APM perempuan lebih tinggi dibanding dengan APM laki-laki.

Mengapa perempuan lebih banyak masuk ke IPB dibandingkan laki-laki? Dugaan kuat hal ini terkait dengan pendidikan di Indonesia yang masih berfungsi memperkuat dan melestarikan struktur masyarakat yang timpang, dan juga ditentukan oleh sistem ekonomi dan politik yang mengelilingi sistem pendidikan tersebut. Sektor pertanian masih jauh dari harapan sebagai sektor yang menjanjikan dibandingkan dengan sektor non pertanian.

Tabel 2. Angka Partisipasi Masuk IPB Menurut Jalur Masuk IPB dan Jenis Kelamin

Angkatan	Jalur Masuk	USMI	Count	Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Masuk	USMI	Count	676	922	1598
			% within Jenis Kelamin	58.2%	60.2%	59.4%
			% of Total	25.1%	34.2%	59.4%
		SPMB	Count	453	536	989
			% within Jenis Kelamin	39.0%	35.0%	36.7%
			% of Total	16.8%	19.9%	36.7%
		BUD	Count	30	73	103
			% within Jenis Kelamin	2.6%	4.8%	3.8%
			% of Total	1.1%	2.7%	3.8%
		Lainnya	Count	2	0	2
			% within Jenis Kelamin	.2%	.0%	.1%
			% of Total	.1%	.0%	.1%
Total	Count	1161	1531	2692		
	% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%		
	% of Total	43.1%	56.9%	100.0%		
2006/2007	Masuk	USMI	Count	718	1073	1791
			% within Jenis Kelamin	64.4%	69.0%	67.1%
			% of Total	26.9%	40.2%	67.1%
		SPMB	Count	354	426	780
			% within Jenis Kelamin	31.7%	27.4%	29.2%
			% of Total	13.3%	15.9%	29.2%
		BUD	Count	42	55	97
			% within Jenis Kelamin	3.8%	3.5%	3.6%
			% of Total	1.6%	2.1%	3.6%
		Lainnya	Count	1	2	3
			% within Jenis Kelamin	.1%	.1%	.1%
			% of Total	.0%	.1%	.1%
Total	Count	1115	1556	2671		
	% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%		
	% of Total	41.7%	58.3%	100.0%		
2007/2008	Masuk	USMI	Count	706	1383	2089
			% within Jenis Kelamin	64.3%	81.2%	74.6%
			% of Total	25.2%	49.4%	74.6%
		SPMB	Count	390	319	709
			% within Jenis Kelamin	35.5%	18.7%	25.3%
			% of Total	13.9%	11.4%	25.3%
		Lainnya	Count	2	1	3
			% within Jenis Kelamin	.2%	.1%	.1%
			% of Total	.1%	.0%	.1%
		Total	Count	1098	1703	2801
			% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%
			% of Total	39.2%	60.8%	100.0%

Dalam hal kesempatan kerja, jenis-jenis pekerjaan yang terkait dengan pertanian memiliki penghargaan dan imbalan yang lebih rendah dibandingkan pekerjaan non pertanian. Sementara itu, kajian gender banyak menunjukkan bahwa manakala satu usaha ekonomi masih bersifat mikro, nampak perempuan dominan didalamnya, namun manakala usaha tersebut makin besar maka lebih banyak laki-laki berperan didalamnya. Hal ini masih ditambah lagi dengan belum hilangnya stereotipe gender pada pendidikan sekolah yang diwujudkan dalam kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan masih mendorong perempuan untuk memilih keilmuan yang sesuai dengan karakter keperempuannya.

Tabel 3. Angka Partisipasi Masuk FEMA Menurut Jalur Masuk dan Jenis Kelamin

Angkatan				Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Jalur Masuk	USMI	Count	31	86	117
			% within Jalur Masuk	26.5%	73.5%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	51.7%	62.8%	59.4%
			% of Total	15.7%	43.7%	59.4%
	SPMB	USMI	Count	26	46	72
			% within Jalur Masuk	36.1%	63.9%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	43.3%	33.6%	36.5%
			% of Total	13.2%	23.4%	36.5%
	BUD	USMI	Count	3	5	8
			% within Jalur Masuk	37.5%	62.5%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	5.0%	3.6%	4.1%
			% of Total	1.5%	2.5%	4.1%
	Total	USMI	Count	60	137	197
% within Jalur Masuk			30.5%	69.5%	100.0%	
% within Jenis Kelamin			100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total			30.5%	69.5%	100.0%	
2006/2007	Jalur Masuk	USMI	Count	26	119	145
			% within Jalur Masuk	17.9%	82.1%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	68.4%	73.5%	72.5%
			% of Total	13.0%	59.5%	72.5%
	SPMB	USMI	Count	11	42	53
			% within Jalur Masuk	70.8%	79.2%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	28.9%	25.9%	26.5%
			% of Total	5.5%	21.0%	26.5%
	BUD	USMI	Count	1	1	2
			% within Jalur Masuk	50.0%	50.0%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	2.6%	.6%	1.0%
			% of Total	.5%	.5%	1.0%
	Total	USMI	Count	38	162	200
% within Jalur Masuk			19.0%	81.0%	100.0%	
% within Jenis Kelamin			100.0%	100.0%	100.0%	
% of Total			19.0%	81.0%	100.0%	
2007/2008	Jalur Masuk	USMI	Count	20	169	189
			% within Jalur Masuk	10.6%	89.4%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	62.5%	78.6%	76.5%
			% of Total	8.1%	68.4%	76.5%
	SPMB	USMI	Count	12	46	58
			% within Jalur Masuk	20.7%	79.3%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	37.5%	21.4%	23.5%
			% of Total	4.9%	18.6%	23.5%
	Total	USMI	Count	32	215	247
			% within Jalur Masuk	13.0%	87.0%	100.0%
			% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%
			% of Total	13.0%	87.0%	100.0%

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Masuk (APM) perempuan di FEMA pada umumnya lebih tinggi dibandingkan APM laki-laki, bahkan cenderung semakin meningkat tajam. Ketimpangan gender dalam pendidikan di FEMA bahkan lebih tajam dibandingkan di tingkat IPB (pada angkatan 2007/2008 sebanyak 87,0 persen jumlah mahasiswa adalah perempuan). Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih memperkuat dan melestarikan struktur masyarakat yang timpang dan belum hilangnya stereotipe gender dalam kurikulum pendidikan (bukankah salah satu peran yang dilekatkan pada perempuan adalah sebagai pengelola lingkungan?, dan keilmuan dalam interaksi manusia – kebudayaannya – dengan lingkungan hidupnya – dipelajari di FEMA).

Tabel 4. Angka Partisipasi Masuk IPB menurut Jenis Kelamin dan Asal Daerah

Angkatan	Asal Daerah	Jenis Kelamin		Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Indonesia Barat	Count	1123	1477	2600	
		% within Jenis Kelamin	96.8%	96.3%	96.5%	
		% of Total	41.7%	54.8%	96.5%	
	Indonesia Tengah	Count	31	46	77	
		% within Jenis Kelamin	2.7%	3.0%	2.9%	
		% of Total	1.2%	1.7%	2.9%	
	Indonesia Timur	Count	4	5	9	
		% within Jenis Kelamin	.3%	.3%	.3%	
		% of Total	.1%	.2%	.3%	
	Luar Negeri	Count	2	5	7	
		% within Jenis Kelamin	.2%	.3%	.3%	
		% of Total	.1%	.2%	.3%	
	Total	Count	1160	1533	2693	
		% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	43.1%	56.9%	100.0%	
2006/2007	Indonesia Barat	Count	1051	1476	2527	
		% within Jenis Kelamin	95.5%	96.0%	95.8%	
		% of Total	39.8%	56.0%	95.8%	
	Indonesia Tengah	Count	44	53	97	
		% within Jenis Kelamin	4.0%	3.4%	3.7%	
		% of Total	1.7%	2.0%	3.7%	
	Indonesia Timur	Count	3	5	8	
		% within Jenis Kelamin	.3%	.3%	.3%	
		% of Total	.1%	.2%	.3%	
	Luar Negeri	Count	2	4	6	
		% within Jenis Kelamin	.2%	.3%	.2%	
		% of Total	.1%	.2%	.2%	
	Total	Count	1100	1538	2638	
		% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	41.7%	58.3%	100.0%	

Angka Partisipasi Masuk (APM) IPB menurut asal daerah dan jenis kelamin hanya dapat dilakukan berdasarkan data tahun 2005 dan 2006. Data pada Tabel 4 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan maupun laki-laki masuk IPB didominasi dari daerah Indonesia Barat (pada angkatan 2006/2007 sebanyak 56,0 persen jumlah mahasiswa perempuan berasal dari Indonesia Barat). Untuk kondisi ini, dugaan di tingkat nasional bahwa keterbatasan partisipasi perempuan (khususnya untuk daerah Indonesia Tengah dan Timur) adalah karena faktor terbatasnya jumlah sekolah dan jarak tempuh yang jauh cenderung juga berlaku untuk IPB. Angka Partisipasi Masuk (APM) FEMA menurut asal daerah dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5.

Berdasarkan APM FEMA menurut asal daerah dan jenis kelamin (lihat Tabel 5), jumlah mahasiswa FEMA yang berasal dari Indonesia Barat pada angkatan 2006/2007 sebanyak 79,5 persen mahasiswa perempuan.

Tabel 5. Angka Partisipasi Masuk FEMA Menurut Asal Daerah dan Jenis Kelamin

Angkatan				Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Asal Daerah	Indonesia Barat	Count	59	135	194
			% within Jenis Kelamin	98.3%	98.5%	98.5%
			% of Total	29.9%	68.5%	98.5%
	Indonesia Tengah	Count	1	1	2	
		% within Jenis Kelamin	1.7%	.7%	1.0%	
		% of Total	.5%	.5%	1.0%	
	Luar Negeri	Count	0	1	1	
		% within Jenis Kelamin	.0%	.7%	.5%	
		% of Total	.0%	.5%	.5%	
	Total	Count	60	137	197	
% within Jenis Kelamin		100.0%	100.0%	100.0%		
% of Total		30.5%	69.5%	100.0%		
2006/2007	Asal Daerah	Indonesia Barat	Count	36	159	195
			% within Jenis Kelamin	94.7%	98.1%	97.5%
			% of Total	18.0%	79.5%	97.5%
	Indonesia Tengah	Count	2	3	5	
		% within Jenis Kelamin	5.3%	1.9%	2.5%	
		% of Total	1.0%	1.5%	2.5%	
	Total	Count	38	162	200	
		% within Jenis Kelamin	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	19.0%	81.0%	100.0%	

Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar (APK) IPB dan FEMA digunakan untuk melihat akses dan pemerataan pendidikan berdasarkan jenis fakultas yang dimasuki di IPB dan jenis program major departemen yang dimasuki di FEMA.

Data pada Tabel 6 menunjukkan bahwa pada angkatan 2007/2008 berdasarkan urutan rangking prosentase partisipan terbanyak untuk mahasiswa laki-laki adalah pada fakultas: (1) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), (2) Kehutanan, (3) Pertanian, (4) Perikanan dan Ilmu Kelautan, (5) Teknologi Pertanian, (6) Ekonomi Manajemen, (7) Peternakan, (8) Kedokteran Hewan, dan (9) Ekologi Manusia. Sedangkan untuk mahasiswa perempuan adalah pada fakultas: (1) Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Ekonomi dan Manajemen, (3) Ekologi Manusia, (4) Pertanian, (5) Perikanan dan Ilmu Kelautan, (5) Teknologi Pertanian, (6) Kehutanan, (7) Peternakan, dan (8) Kedokteran Hewan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa masih terjadi stereotipe gender dalam kurikulum pendidikan, kecuali untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dimana pilihan ilmu untuk laki-laki pada pengetahuan dan ketrampilan teknik seperti kehutanan, pertanian dan perikanan.

Sedangkan pilihan ilmu untuk perempuan pada pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan pekerjaan produksi subsistensi dan reproduksi di lingkungan keluarga (ekonomi dan manajemen, ekologi manusia, dan pertanian). Satu hal di luar dugaan adalah bahwa mitos terhadap matematika yang dianggap bias gender (didominasi laki-laki, patriarkhis, diskriminatif) ternyata tidak berlaku di IPB karena partisipasi perempuan di fakultas tersebut paling banyak dibandingkan yang lain.

Tabel 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) IPB Menurut Fakultas dan Jenis Kelamin

Angkatan	Fakultas			Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Fakultas	FAPERTA	Count	156	202	358
			% of Total	5.8%	7.5%	13.3%
		FKH	Count	36	72	108
			% of Total	1.3%	2.7%	4.0%
		FPIK	Count	167	154	321
			% of Total	6.2%	5.7%	11.9%
		FAPET	Count	68	105	173
			% of Total	2.5%	3.9%	6.4%
		FAHUTAN	Count	143	159	302
			% of Total	5.3%	5.9%	11.2%
		FATETA	Count	147	179	326
			% of Total	5.5%	6.6%	12.1%
		FMIPA	Count	246	287	533
			% of Total	9.1%	10.7%	19.8%
Total		Count	1161	1533	2694	
		% of Total	43.1%	56.9%	100.0%	
2006/2007	Fakultas	FAPERTA	Count	153	205	358
			% of Total	5.7%	7.7%	13.4%
		FKH	Count	35	78	113
			% of Total	1.3%	2.9%	4.2%
		FPIK	Count	158	156	314
			% of Total	5.9%	5.8%	11.8%
		FAPET	Count	66	101	167
			% of Total	2.5%	3.8%	6.3%
		FAHUTAN	Count	146	150	296
			% of Total	5.5%	5.6%	11.1%
		FATETA	Count	155	169	324
			% of Total	5.8%	6.3%	12.1%
		FMIPA	Count	232	296	528
			% of Total	8.7%	11.1%	19.8%
Total		Count	1115	1556	2671	
		% of Total	41.7%	58.3%	100.0%	
2007/2008	Fakultas	FAPERTA	Count	149	209	358
			% of Total	5.3%	7.5%	12.8%
		FKH	Count	55	79	134
			% of Total	2.0%	2.8%	4.8%
		FPIK	Count	141	173	314
			% of Total	5.0%	6.2%	11.2%
		FAPET	Count	70	119	189
			% of Total	2.5%	4.2%	6.7%
		FAHUTAN	Count	151	156	307
			% of Total	5.4%	5.6%	11.0%
		FATETA	Count	138	175	313
			% of Total	4.9%	6.2%	11.2%
		FMIPA	Count	238	303	541
			% of Total	8.5%	10.8%	19.3%
Total		Count	1098	1703	2801	
		% of Total	39.2%	60.8%	100.0%	

Data pada Tabel 7 untuk partisipasi mahasiswa perempuan dan laki-laki di tingkat FEMA menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana selama tiga tahun terakhir laki-laki lebih banyak memilih ilmu di bidang komunikasi dan pengembangan masyarakat, sementara perempuan lebih banyak memilih keilmuan di bidang gizi masyarakat. Demikian pula bidang ilmu keluarga dan konsumen juga lebih banyak dipilih oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

Tabel 7. Angka Partisipasi Kasar FEMA Menurut Departemen dan Jenis Kelamin

Angkatan	Departemen			Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
2005/2006	Departemen	Gizi Masyarakat	Count	12	58	70
			% of Total	6.1%	29.4%	35.5%
		Ilmu Keluarga dan Konsumen	Count	2	34	36
	% of Total		1.0%	17.3%	18.3%	
	Komunikasi dan Pengembangan	Count	46	45	91	
		% of Total	23.4%	22.8%	46.2%	
Total	Count	60	137	197		
	% of Total	30.5%	69.5%	100.0%		
2006/2007	Departemen	Gizi Masyarakat	Count	7	63	70
			% of Total	3.5%	31.5%	35.0%
		Ilmu Keluarga dan Konsumen	Count	2	38	40
	% of Total		1.0%	19.0%	20.0%	
	Komunikasi dan Pengembangan	Count	29	61	90	
		% of Total	14.5%	30.5%	45.0%	
Total	Count	38	162	200		
	% of Total	19.0%	81.0%	100.0%		
2007/2008	Departemen	Gizi Masyarakat	Count	13	90	103
			% of Total	5.3%	36.4%	41.7%
		Ilmu Keluarga dan Konsumen	Count	3	38	41
	% of Total		1.2%	15.4%	16.6%	
	Komunikasi dan Pengembangan	Count	16	87	103	
		% of Total	6.5%	35.2%	41.7%	
Total	Count	32	215	247		
	% of Total	13.0%	87.0%	100.0%		

Berdasarkan Angka Partisipasi Murni IPB menurut departemen dan jenis kelamin (Tabel 8) memperlihatkan gambaran bahwa terjadi kecenderungan masih adanya pembakuan peran sosial yang cukup tegas antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi yang tergambar dalam Tabel 8, bersumber dari masih adanya stereotipe gender dalam kurikulum pendidikan, dimana pilihan keilmuan laki-laki mengarah pada penguasaan teknis dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak di ruang publik, sementara pilihan keilmuan perempuan mengarah pada penguasaan kemampuan keperempuanan dalam mengelola produksi subsistensi dan reproduksi di lingkungan keluarga. Partisipasi mahasiswa laki-laki masuk IPB lebih banyak pada departemen ilmu tanah dan agrohort, sementara perempuan di proteksi dan lanskap (FAPERTA), partisipasi laki-laki lebih banyak di budidaya perikanan dan ilmu teknologi kelautan, sementara perempuan lebih banyak di manajemen sumberdaya perairan dan teknologi hasil perairan (FPIK).

Tabel 8. Angka Partisipasi Murni IPB Menurut Departemen dan Jenis Kelamin

Fakultas				Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
FAPERTA	Departemen	IT	Count	105	134	239
			% within Departemen	43.9	56.1	100
		Agrohot	Count	205	249	454
			% within Departemen	45.2	54.8	100
		Protek	Count	74	124	198
			% within Departemen	37.4	62.6	100
		Lanskap	Count	74	109	183
			% within Departemen	40.4	59.6	100
	Total		Count	458	616	1074
			% within Departemen	42.6	57.4	100
FKH	Departemen	KH	Count	126	229	355
			% within Departemen	35.5	64.5	100
	Total		Count	126	229	355
			% within Departemen	35.5	64.5	100
FPIK	Departemen	BDP	Count	115	81	196
			% within Departemen	58.7	41.3	100
		MSP	Count	87	105	192
			% within Departemen	45.3	54.7	100
		THP	Count	70	131	201
			% within Departemen	34.8	65.2	100
		PSP	Count	80	89	169
			% within Departemen	47.3	52.7	100
		ITK	Count	114	77	191
			% within Departemen	59.7	40.3	100
Total		Count	466	483	949	
		% within Departemen	49.1	50.9	100	
FAPET	Departemen	IPTP	Count	107	178	285
			% within Departemen	37.5	62.5	100
		INTP	Count	97	147	244
			% within Departemen	39.8	60.2	100
	Total		Count	204	325	529
			% within Departemen	38.6	61.4	100
FAHUTAN	Departemen	MH	Count	137	156	293
			% within Departemen	46.8	53.2	100
		THH	Count	97	97	194
			% within Departemen	50	50	100
		KSH	Count	137	124	261
			% within Departemen	52.5	47.5	100
		Silvi	Count	69	88	157
			% within Departemen	43.9	56.1	100
	Total		Count	440	465	905
			% within Departemen	48.6	51.4	100

Selanjutnya, berdasarkan Angka Partisipasi Murni IPB menurut departemen dan jenis kelamin akan semakin nampak bahwa terjadi kecenderungan masih adanya pembakuan peran sosial yang cukup tegas antara laki-laki dan perempuan (Tabel 9).

Tabel 9. Angka Partisipasi Murni IPB Menurut Departemen dan Jenis Kelamin

Fakultas				Jenis Kelamin		Total
				Laki-Laki	Perempuan	
FATETA	Departemen	TP	Count	190	117	307
			% within Departemen	61.9	38.1	100
		ITP	Count	121	215	336
			% within Departemen	36.0	64.0	100
		TIN	Count	129	191	320
			% within Departemen	40.3	59.7	100
Total			Count	440	523	963
			% within Departemen	45.7	54.3	100
FMIPA	Departemen	Statis	Count	71	109	180
			% within Departemen	39.4	60.6	100
		GFM	Count	71	65	136
			% within Departemen	52.2	47.8	100
		Bio	Count	80	197	277
			% within Departemen	28.9	71.1	100
		Kimia	Count	77	149	226
			% within Departemen	34.1	65.9	100
		Mate	Count	86	109	195
			% within Departemen	44.1	55.9	100
		Ilkom	Count	193	92	285
			% within Departemen	67.7	32.3	100
		Fisika	Count	67	63	130
			% within Departemen	51.5	48.5	100
Biokim	Count	71	102	173		
	% within Departemen	41.0	59.0	100		
Total			Count	716	886	1602
			% within Departemen	44.7	55.3	100
FEM	Departemen	IE	Count	103	192	295
			% within Departemen	34.9	65.1	100
		Menej	Count	125	220	345
			% within Departemen	36.2	63.8	100
		AGB	Count	104	206	310
			% within Departemen	33.5	66.5	100
		ESL	Count	62	133	195
			% within Departemen	31.8	68.2	100
Total			Count	394	751	1145
			% within Departemen	34.4	65.6	100
FEMA	Departemen	GM	Count	32	211	243
			% within Departemen	13.2	86.8	100
		IKK	Count	7	110	117
			% within Departemen	6.0	94.0	100
		KPM	Count	91	193	284
			% within Departemen	32.0	68.0	100
Total			Count	130	514	644
			% within Departemen	20.2	79.8	100

Sementara pada fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, dimana sebelumnya sudah dikemukakan bahwa partisipasi mahasiswa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki ternyata ketika dilihat per

departemen juga menunjukkan kecenderungan yang sama dan memperkuat kembali masih adanya stereotipe gender dalam kurikulum pendidikan. Partisipasi perempuan lebih banyak memilih keilmuan biologi, kimia dan statistika, sedangkan laki-laki memilih keilmuan Ilmu Komputer, Fisika dan GFM.

Salah satu faktor yang membatasi perempuan memasuki perguruan tinggi adalah kendala biaya. Pada keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan biaya, maka dianggap investasi menyekolahkan anak perempuan lebih rendah daripada untuk anak laki-laki. Data pada Tabel 10 juga menunjukkan kecenderungan yang sama, dimana jumlah mahasiswa FEMA pada tahun 2007 yang mengajukan beasiswa lebih banyak perempuan.

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Pendaftar Beasiswa Periode Juli s/d Desember 2007

BBM		PPA		PT DJARUM	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
2 (20,0%)	8 (80,0%)	3 (7,9%)	35 (92,1%)	1 (33,3%)	2 (66,7%)
8 (100%)		8 (100%)		8 (100%)	

2. Mutu dan Relevansi Pendidikan

Dalam hal prestasi yang dicapai, data mahasiswa di tingkat TPB tahun 2005/06 menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan tidak kalah dengan laki-laki, bahkan cenderung lebih tinggi. Sementara mahasiswa *drop-out* justru lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan.

Berdasarkan data Tabel 11 nampak bahwa mahasiswa perempuan cenderung memiliki IPK lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sementara peluang untuk DO ternyata lebih banyak dihadapi mahasiswa laki-laki dibandingkan perempuan.

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Mahasiswa Berprestasi dan *Droup Out* di TPB-IPB Tahun 2005/2006

IPK di atas 3,5		Droup Out	
L	P	L	P
126 39,5%	193 60,5%	35 64,8%	19 35,2%
319 (100%)		54 (100%)	

Pada tahun 2004 dari 8 mahasiswa berprestasi 37,5 persen adalah laki-laki sedangkan perempuan mencapai 62,5 persen (Tabel 12). Pada tahun 2006 jumlah perempuan mencapai tiga kali lipat jumlah perempuan, namun pada tahun 2007 jumlah perempuan yang berprestasi sebanyak jumlah laki-laki (Tabel 12).

Namun hal yang perlu dikritisi adalah apakah prestasi ini nantinya akan berimplikasi pada kemampuan untuk memperoleh lapangan pekerjaan setelah mereka lulus. Berbagai kajian menunjukkan bahwa walaupun prestasi akademis mahasiswa perempuan lebih baik dari laki-laki, kecenderungan mereka untuk bekerja lebih rendah dari laki-laki karena adanya hambatan struktural misal harus menikah atau mengikuti suami bekerja.

Tabel 12. Jumlah Mahasiswa Berprestasi IPB Berdasarkan Jenis Kelamin

2004		2006		2007	
Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
3 (37,5%)	5 (62,5%)	2 (25,0%)	6 (75,0%)	4 (50,0%)	4 (50,0%)
8 (100%)		8 (100%)		8 (100%)	

3. Manajemen Pendidikan

Salah satu indikator untuk melihat sejauhmana kebijakan pembangunan pendidikan telah responsif gender adalah melihat manajemen pendidikan yang mencakup indikator: proporsi perempuan dan laki-laki dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Tabel di bawah ini menunjukkan kondisi proporsi pemangku kebijakan di IPB

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Pejabat Struktural semua level IPB Menurut Jenis Kelamin tahun 2006

Jenis Kelamin	Pejabat Struktural Semua Level	
	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	200	75,2
Perempuan	66	24,8
Total	266	100,0

Tabel 13 menunjukkan bahwa pejabat struktural semua level di IPB didominasi oleh laki-laki (75,2 persen). Hal ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan gender dalam pencapaian jabatan struktural di IPB. Hal ini disebabkan oleh banyak hambatan baik secara kultural maupun struktural. Secara kultural perempuan kadang dianggap tidak mampu memegang jabatan tinggi karena dianggap emosional dan tidak rasional, perempuan juga dianggap bukan *decision maker* yang tegas, perempuan juga mempunyai tanggungjawab yang dibebankan masyarakat kepada mereka sebagai pengasuh anak yang utama sehingga dianggap "salah" jika meninggalkan keluarga dan lebih mementingkan karirnya. Pada titik inilah hambatan-hambatan tersebut membuat perempuan memiliki "keraguan" untuk menduduki jabatan struktural. Belum lagi hambatan ideologis dan struktural misalnya anggapan bahwa pemimpin sebaiknya laki-laki. Hal-hal yang seperti itu pada akhirnya membuat perempuan merasa "tidak pantas" dan kadang "didosmetifikasi" untuk memegang jabatan struktural tertentu.

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Pejabat Struktural menurut Jenis Kelamin Tahun 2006

Jabatan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Rektor/Wakil Rektor	4 (100%)	0 (0%)	4 (100%)
Direktur	9 (100%)	0 (0%)	9 (100%)
Dekan	10 (100%)	0 (0%)	10 (100%)
Kepala LPPM/Pusat	11 (78,6%)	3 (21,4%)	14 (100%)
Wakil Dekan/ Program/Lembaga	9 (81,8%)	2 (18,2%)	11 (100%)
Kepala Kantor/Perpustakaan	9 (81,8%)	2 (18,2%)	11 (100%)
Kepala Departemen	27 (79,4%)	7 (20,6%)	34 (100%)

Data pada Tabel 14 menunjukkan bahwa makin mempertegas penjelasan di atas bahwa pejabat-pejabat IPB, terutama jajaran pejabat pengambil keputusan masih didominasi oleh laki-laki. Bahkan jabatan strategis Rektor, Wakil Rektor, Direktur dan Dekan tidak ada satupun yang dipegang oleh perempuan.

Tabel 15 menggambarkan satu kecenderungan yang menarik, bahwa staf pengajar fakultas pertanian didominasi oleh laki-laki dan ini berlaku pada semua departemen dan di hampir semua strata pendidikan. Angka yang sangat ekstrim misalnya di departemen ilmu tanah dan sumberdaya lahan, dari 37 staf pengajar yang bergelar doktor, sebanyak 89,2 persennya adalah staf pengajar laki-laki.

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Pertanian IPB Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tahun 2006

Fakultas Pertanian				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Ilmu Tanah & Sumberdaya Lahan	JK	Laki-Laki	Jumlah	3	10	33	46
			% thd Pendidikan	75.0	76.9	89.2	85.2
	Perempuan	Jumlah	1	3	4	8	
		% thd Pendidikan	25.0	23.1	10.8	14.8	
	Total	Jumlah	4	13	37	54	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Agronomi & Hortikultura	JK	Laki-Laki	Jumlah	3	15	26	44
			% thd Pendidikan	50.0	57.7	65.0	61.1
	Perempuan	Jumlah	3	11	14	28	
		% thd Pendidikan	50.0	42.3	35.0	38.9	
	Total	Jumlah	6	26	40	72	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Proteksi Tanaman	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	3	23	27
			% thd Pendidikan	100	42.9	65.7	62.8
	Perempuan	Jumlah	0	4	12	16	
		% thd Pendidikan	0.0	57.1	34.3	37.2	
	Total	Jumlah	1	7	35	43	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Arsitektur Lanskap	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	1	7	9
			% thd Pendidikan	33.3	33.3	63.6	52.9
	Perempuan	Jumlah	2	2	4	8	
		% thd Pendidikan	66.7	66.7	36.4	47.1	
	Total	Jumlah	3	3	11	17	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	

Keterangan: JK = Jenis Kelamin

Sementara itu di fakultas kedokteran hewan (Tabel 16), walaupun staf pengajar laki-laki masih mendominasi baik dalam kuantitas maupun tingkat pendidikan, namun angkanya tidak seekstrim di Fakultas Pertanian karena dari 65 staf pengajar bergelar doktor di Fakultas Kedokteran Hewan, perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 53,8 persen dan 46,2 persen.

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar FKH IPB Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, 2006

Fakultas Kedokteran Hewan (FKH)			Pendidikan			Total	
			S1	S2	S3		
Kedokteran Hewan	JK	Laki-Laki	Jumlah	13	17	35	65
			% thd Pendidikan	76.5	63.0	53.8	59.6
		Perempuan	Jumlah	4	10	30	44
			% thd Pendidikan	23.5	37.0	46.2	40.4
	Total	Jumlah	17	27	65	109	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	

Temuan menarik juga terdapat di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di semua departemen staf pengajar didominasi oleh laki-laki (Tabel 17).

Tabel 17. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar FPIK IPB Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan tahun 2006

Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan			Pendidikan			Total	
			S1	S2	S3		
Budidaya Perairan	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	5	13	19
			% thd Pendidikan	50.0	55.6	72.2	65.5
		Perempuan	Jumlah	1	4	5	10
			% thd Pendidikan	50.0	44.4	27.8	34.5
	Total	Jumlah	2	9	18	29	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Manajemen Sumberdaya Perairan	JK	Laki-Laki	Jumlah	4	8	22	34
			% thd Pendidikan	66.7	66.7	91.7	81.0
		Perempuan	Jumlah	2	4	2	8
			% thd Pendidikan	33.3	33.3	8.3	19.0
	Total	Jumlah	6	12	24	42	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Teknologi Hasil Perikanan	JK	Laki-Laki	Jumlah	3	6	1	10
			% thd Pendidikan	60.0	40.0	20.0	40.0
		Perempuan	Jumlah	2	9	4	15
			% thd Pendidikan	40.0	60.0	80.0	60.0
	Total	Jumlah	5	15	5	25	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	9	14	24
			% thd Pendidikan	33.3	69.2	93.3	77.4
		Perempuan	Jumlah	2	4	1	7
			% thd Pendidikan	66.7	30.8	6.7	22.6
	Total	Jumlah	3	13	15	31	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Ilmu & Teknologi Kelautan	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	4	18	24
			% thd Pendidikan	100	57.1	94.7	85.7
		Perempuan	Jumlah	0	3	1	4
			% thd Pendidikan	0.0	42.9	5.3	14.3
	Total	Jumlah	2	7	19	28	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	

Data pada Tabel 17 menunjukkan bahwa hanya satu departemen yang staf pengajarnya lebih banyak staf pengajar perempuan yaitu pada departemen Teknologi Hasil Perikanan. Bahkan untuk staf pengajar bergelar doktor pada departemen ini, 80 persennya adalah perempuan. Kondisi ini sekaligus juga mengindikasikan bahwa stereotipe gender perempuan sebagai pengolah makanan (dalam hal ini budidaya perikanan) masih dominan. Perempuan masih bergerak dalam bidang yang merupakan “perpanjangan tangan” dari proses produksi subsistensi dan reproduksi di lingkungan keluarga, dalam hal ini fungsi untuk mengolah makanan. Perempuan dicitrakan sebagai sosok yang harus pandai memasak dan mengolah makanan, sementara laki-laki dianggap “kurang pantas” untuk memiliki keahlian ini.

Tabel 18 menunjukkan distribusi staf pengajar Fakultas Peternakan dan Fakultas Kehutanan. Di fakultas peternakan jumlah staf pengajar baik dilihat dari jenis kelamin dan tingkat pendidikannya relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 18. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Peternakan dan Fakultas Kehutanan IPB Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, 2006

Fakultas Peternakan				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Ilmu Produksi & Teknologi Peternakan	JK	Laki-Laki	Jumlah	8	9	9	26
			% thd Pendidikan	80.0	45.0	69.2	60.5
	Perempuan	Jumlah	2	11	4	17	
		% thd Pendidikan	20.0	55.0	30.8	39.5	
	Total	Jumlah	10	20	13	43	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	8	14	23
			% thd Pendidikan	25.0	61.5	58.3	56.1
	Perempuan	Jumlah	3	5	10	18	
		% thd Pendidikan	75.0	38.5	41.7	43.9	
	Total	Jumlah	4	13	24	41	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Fakultas Kehutanan				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Manajemen Kehutanan	JK	Laki-Laki	Jumlah	5	15	14	34
			% thd Pendidikan	83.3	83.3	82.4	82.9
	Perempuan	Jumlah	1	3	3	7	
		% thd Pendidikan	16.7	16.7	17.6	17.1	
	Total	Jumlah	6	18	17	41	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Teknologi Hasil Hutan	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	6	16	24
			% thd Pendidikan	66.7	66.7	100	85.7
	Perempuan	Jumlah	1	3	0	4	
		% thd Pendidikan	33.3	33.3	0.0	14.3	
	Total	Jumlah	3	9	16	28	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Konservasi Sumberdaya Hutan & Ekowisata	JK	Laki-Laki	Jumlah	0	13	13	26
			% thd Pendidikan	0.0	76.5	72.2	70.3
	Perempuan	Jumlah	2	4	5	11	
		% thd Pendidikan	100	23.5	27.8	29.7	

	Total		Jumlah	2	17	18	37
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Silvikultur	JK	Laki-Laki	Jumlah	4	5	13	22
			% thd Pendidikan	100	71.4	72.2	75.9
		Perempuan	Jumlah	0	2	5	7
			% thd Pendidikan	0.0	28.6	27.8	24.1
	Total		Jumlah	4	7	18	29
			% thd Pendidikan	100	100	100	100

Hal yang menarik adalah di Fakultas Kehutanan, karena di semua departemen, staf pengajar yang dominan baik dari segi kuantitas maupun tingkat pendidikan adalah laki-laki. Bahkan di departemen teknologi hasil hutan, 100 persen (16 orang) staf pengajar yang bergelar doktor, semuanya adalah laki-laki. Hal ini juga masih mengindikasikan steroeotype gender yang kuat bahwa laki-laki adalah sosok maskulin, *adventurer*, petualang, penakluk belantara hutan. Sebaliknya perempuan adalah sosok lemah yang ditaklukkan.

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan tahun 2006

Fakultas Teknologi Pertanian				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Teknologi Pertanian	JK	Laki-Laki	Jumlah	6	13	29	48
			% thd Pendidikan	75.0	76.5	87.9	82.8
		Perempuan	Jumlah	2	4	4	10
			% thd Pendidikan	25.0	23.5	12.1	17.2
	Total		Jumlah	8	17	33	58
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Ilmu & Teknologi Pangan	JK	Laki-Laki	Jumlah	5	7	17	29
			% thd Pendidikan	45.5	53.8	56.7	53.7
		Perempuan	Jumlah	6	6	13	25
			% thd Pendidikan	54.5	46.2	43.3	46.3
	Total		Jumlah	11	13	30	54
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Teknologi Industri Pertanian	JK	Laki-Laki	Jumlah	4	10	19	33
			% thd Pendidikan	80.0	52.5	61.3	63.5
		Perempuan	Jumlah	1	6	12	19
			% thd Pendidikan	20.0	37.5	38.7	36.5
	Total		Jumlah	5	16	31	52
			% thd Pendidikan	100	100	100	100

Tabel 20. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan tahun 2006

FMIPA				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Statistika	JK	Laki-Laki	Jumlah	6	6	10	22
			% thd Pendidikan	66.7	100	90.9	84.6
		Perempuan	Jumlah	3	0	1	4
			% thd Pendidikan	33.3	0.0	9.1	15.4

	FMIPA		Pendidikan			Total	
			S1	S2	S3		
	Total		Jumlah	9	6	11	26
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Geofikasi & Meteorologi	JK	Laki-Laki	Jumlah	4	8	7	19
			% thd Pendidikan	100	72.7	100	86.4
		Perempuan	Jumlah	0	3	0	3
			% thd Pendidikan	0.0	27.3	0	13.6
	Total		Jumlah	4	11	7	22
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Biologi	JK	Laki-Laki	Jumlah	5	3	16	24
			% thd Pendidikan	55.6	27.3	48.5	45.3
		Perempuan	Jumlah	4	8	17	29
			% thd Pendidikan	44.4	72.7	51.5	54.7
	Total		Jumlah	9	11	33	53
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Matematika	JK	Laki-Laki	Jumlah	0	10	10	20
			% thd Pendidikan	0	62.5	83.3	69.0
		Perempuan	Jumlah	1	6	2	9
			% thd Pendidikan	100	37.5	16.7	31.0
	Total		Jumlah	1	16	12	29
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Kimia	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	6	2	10
			% thd Pendidikan	25	42.9	28.6	34.5
		Perempuan	Jumlah	6	8	5	19
			% thd Pendidikan	75	57.1	71.4	65.5
	Total		Jumlah	8	14	7	29
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Ilmu Komputer	JK	Laki-Laki	Jumlah	8	5		13
			% thd Pendidikan	57.1	62.5		59.1
		Perempuan	Jumlah	6	3		9
			% thd Pendidikan	42.9	37.5		40.9
	Total		Jumlah	14	8		22
			% thd Pendidikan	100	100		100
Fisika	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	9	5	16
			% thd Pendidikan	100	81.8	100	88.9
		Perempuan	Jumlah	0	2	0	2
			% thd Pendidikan	0	18.2	0	11.1
	Total		Jumlah	2	11	5	18
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Biokimia	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	2	4	7
			% thd Pendidikan	20.0	50.0	66.7	46.7
		Perempuan	Jumlah	4	2	2	8
			% thd Pendidikan	80.0	50.0	33.3	53.3
	Total		Jumlah	5	4	6	15
			% thd Pendidikan	100	100	100	100

Tabel 21. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan, 2006

Fakultas Ekonomi & Manajemen				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Ilmu Ekonomi	JK	Laki-Laki	Jumlah	1	7	14	22
			% thd Pendidikan	25.0	77.8	73.7	68.8
	JK	Perempuan	Jumlah	3	2	5	10
			% thd Pendidikan	75.0	22.2	26.3	31.3
	Total		Jumlah	4	9	19	32
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Manajemen	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	8	4	14
			% thd Pendidikan	50.0	66.7	66.7	63.6
	JK	Perempuan	Jumlah	2	4	2	8
			% thd Pendidikan	50.0	33.3	33.3	36.4
	Total		Jumlah	4	12	6	22
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Agribisnis	JK	Laki-Laki	Jumlah	5	8	4	17
			% thd Pendidikan	55.6	42.1	44.4	45.9
	JK	Perempuan	Jumlah	4	11	5	20
			% thd Pendidikan	44.4	57.9	55.6	54.1
	Total		Jumlah	9	19	9	37
			% thd Pendidikan	100	100	100	100
Ekonomi Sumberdaya Lingkungan	JK	Laki-Laki	Jumlah	2	4	8	14
			% thd Pendidikan	100	80.0	100	93.3
	JK	Perempuan	Jumlah	0	1	0	1
			% thd Pendidikan	0.0	20.0	0.0	6.7
	Total		Jumlah	2	5	8	15
			% thd Pendidikan	100	100	100	100

Di FEMA, distribusi staf pengajar di Departemen Gizi Masyarakat cenderung seimbang antara laki-laki dan perempuan baik dilihat dari kuantitas maupun tingkat pendidikan, hal ini cukup menarik bahwa baik laki-laki ataupun perempuan punya kepedulian terhadap persoalan gizi masyarakat. Pada Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat jumlah staf pengajar perempuan hanya 34 persen dibanding laki-laki, demikian juga yang sudah meraih gelar Doktor, baru 5 orang (29,4 persen).

Tabel 22. Jumlah dan Persentase Tenaga Pengajar Fakultas Ekologi Manusia Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan tahun 2006

Fakultas Ekologi Manusia				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Gizi Masyarakat	JK	Laki-Laki	Jumlah	4	2	10	16
			% thd Pendidikan	80.0	33.3	52.6	53.3
	JK	Perempuan	Jumlah	1	4	9	14
			% thd Pendidikan	20.0	66.7	47.4	46.7
	Total		Jumlah	5	6	19	30
			% thd Pendidikan	100	100	100	100

Fakultas Ekologi Manusia				Pendidikan			Total
				S1	S2	S3	
Ilmu Konsumen & Keluarga	JK	Laki-Laki	Jumlah	0	1	2	3
			% thd Pendidikan	0.0	16.7	25.0	18.8
	Perempuan	Jumlah	2	5	6	13	
		% thd Pendidikan	100	83.3	75.0	81.3	
	Total	Jumlah	2	6	8	16	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	
Komunikasi & Pengembangan Masyarakat	JK	Laki-Laki	Jumlah	0	13	12	25
			% thd Pendidikan	0.0	68.4	70.6	65.8
	Perempuan	Jumlah	2	6	5	13	
		% thd Pendidikan	100	31.6	29.4	34.2	
	Total	Jumlah	2	19	17	38	
		% thd Pendidikan	100	100	100	100	

Sementara temuan menarik terdapat di Ilmu konsumen dan keluarga karena dari 16 staf pengajarnya, 81,3% (13 orang) adalah perempuan. Hal ini menunjukkan masih kuatnya stereotype gender bahwa perempuan adalah sosok yang caring dan memiliki *concern* dan tanggungjawab penuh terhadap persoalan-persoalan dalam keluarga.

Tabel 23 Jumlah Tenaga Pengajar Tetap Fakultas Ekologi Manusia-IPB Berdasarkan Jenis Kelamin, Departemen dan Golongan Keadaan Tahun 2007

Unit Kerja	Golongan																					
	III										IV											
	A		B		C		D		Jumlah		A		B		C		D		E		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
GIZ	2	3	-	2	2	-	5	5	9	10	1	1	3	3	-	-	1	-	1	-	6	4
IKK	-	3	-	2	1	4	1	4	2	13	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2
KPM	-	-	3	6	5	4	4	1	12	11	7	1	6	2	1	-	-	-	-	-	14	3
Jumlah	2	6	3	10	8	8	10	10	23	34	8	2	10	10	1	-	1	-	1	-	21	9

Bila distribusi staf pengajar di FEMA dianalisis lebih jauh berdasarkan golongan (Tabel 23) dan jabatan fungsional (tabel 24) menunjukkan juga satu kecenderungan yang menarik untuk dikritisi. Nampak pada tabel 23 bahwa ketika masih berada di Golongan III, distribusi staf pegajar perempuan cenderung lebih banyak dibanding staf pengajar laki-laki, dan hal ini berlaku pada tiga departemen. Namun ketika memasuki golongan IV, staf pengajar laki-laki jumlahnya lebih dominan dibanding staf pengajar perempuan.

Tabel 24 Keadaan tenaga pengajar Fakultas Ekologi Manusia IPB berdasarkan jenis kelamin dan jabatan fungsional keadaan tahun 2007

Departemen	Asisten Ahli		Lektor		Lektor Kepala		Guru Besar		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
GIZ	1	3	4	4	5	6	4	-	14	13
IKK	-	2	1	6	1	4	1	-	3	12
KPM	2	4	9	5	14	4	-	-	25	13
Jumlah	3	9	14	15	20	14	5	-	42	38

Demikian juga dalam pencapaian jabatan fungsional, dari 5 orang guru besar yang dimiliki FEMA, kelima-limanya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan masih kuatnya hambatan kultural dan struktural para staf pengajar perempuan di FEMA. Sosialisasi peran seks kadangkala membuat perempuan merasa berkewajiban untuk memenuhi harapan budaya dan tradisi dengan menjadi isteri, ibu serta mengabdikan pada keluarga. Kesadaran akan posisi semacam ini menyebabkan perempuan untuk membatasi kariernya sampai jenjang yang lebih optimal.

ISUE-ISUE KESENJANGAN GENDER DALAM PENDIDIKAN FEMA – IPB

- 1) FEMA-IPB lebih banyak diakses oleh perempuan
Tidak cukup dibicarakan di tingkat fakultas maupun IPB, namun harus dikumandangkan di tingkat nasional bahwa ketimpangan gender masih berlangsung di bidang pendidikan. Praktek ketimpangan gender pendidikan ini terjadi karena sistem ekonomi dan politik yang mengelilingi sistem pendidikan juga masih timpang. Masa depan sektor pertanian yang belum menjanjikan dibandingkan sektor non pertanian, dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang masih jauh dari harapan nampaknya belum dapat memajukan suatu bangsa. Dalam konstruksi sosial seperti itu, golongan miskin (sebagian besar masyarakat petani di pedesaan) dan kaum perempuan adalah yang paling tidak diuntungkan. Haruskah akhirnya kita dengan berat hati menyatakan bahwa wajah pendidikan pertanian adalah wajah perempuan?
- 2) Masih adanya stereotipe gender dalam kurikulum pendidikan
Gejala pemisahan gender (*gender segregation*) dalam fakultas maupun program major departemen di IPB sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender sukarela (*voluntary discrimination*) ke dalam bidang keahlian masih banyak ditemukan. Pemilihan bidang keilmuan yang dimasuki mahasiswa laki-laki maupun perempuan masih ditentukan oleh pandangan bahwa laki-laki lebih sesuai pada ilmu-ilmu keras, teknologi dan industri, sementara perempuan lebih sesuai pada ilmu-ilmu yang terkait dengan karakter keperempuanannya dan pekerjaan-pekerjaan subsistensi.
- 3) Masih adanya kesenjangan gender dalam manajemen pendidikan
Secara kuantitas, jumlah dosen perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, namun secara kualitas (gelar akademik, kepangkatan, jabatan struktural dan jabatan fungsional) relatif lebih rendah dibandingkan dosen laki-laki. Hal ini juga terkait dengan masih adanya kendala budaya dan struktural atas mobilitas perempuan.
- 4) Masih adanya sikap sosial terhadap pendidikan dan nilai-nilai yang menyertai terhadap pendidikan laki-laki dan perempuan. Bahwa pendidikan itu mahal, dan tidak menguntungkan investasi pendidikan bagi anak perempuan. Hal ini juga bisa berarti sebaliknya, bahwa pendidikan pertanian itu relatif "lebih murah" dibandingkan dengan yang lain, dan bahwa perempuan relatif "lebih pantas" dibandingkan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan pertanian.
- 5) Kendala pembiayaan pendidikan terutama bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan mahasiswa perempuan.
Masih terbatasnya akses perempuan dari Indonesia Timur dan Tengah pada pendidikan IPB dan banyaknya mahasiswa perempuan mengajukan beasiswa menunjukkan bahwa biaya pendidikan menjadi kendala utama bagi mereka untuk maju. Hal ini juga ditentukan oleh masih adanya kendala budaya terkait mobilitas perempuan (lokasi jauh, keamanan, kekhawatiran orangtua).
- 6) Perubahan perilaku gender di lingkungan FEMA-IPB belum sampai tahap peduli (*responsif*) gender. Salah satu cara untuk mencapai perubahan perilaku adalah melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi antara lain melalui pengintegrasian pendidikan gender dalam kurikulum pendidikan. Di tingkat sarjana, terdapat dua mata kuliah gender, yaitu: (1) Gender dan keluarga (Dept. IKK-FEMA) – mayor,

dan (2) Gender dan Pembangunan (Dept. KPM-FEMA) – mayor elektif, namun belum menjadi mata kuliah wajib (misalnya di TPB-IPB).

PENUTUP

Pendidikan bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memiliki daya dorong pada perubahan, bisa melahirkan orang-orang kritis dan kreatif. Di sisi lain, ia mempunyai fungsi memperkuat dan melestarikan struktur masyarakat yang timpang. Kesenjangan gender dalam pendidikan tinggi masih terjadi di Indonesia (setidaknya dalam lingkungan FEMA-IPB), dan hal ini berimplikasi pada perubahan peran perempuan relatif masih pada tataran kuantitasnya belum pada kualitasnya.

Dari telaah terhadap pelaksanaan pembangunan pendidikan FEMA – IPB tersebut, maka dapat diambil kebijakan yang terkait dengan: (1) memastikan akses pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan di beragam bidang pendidikan, (2) memastikan akses pendidikan untuk keluarga miskin (3) mengupayakan pemecahan masalah yang terkait dengan budaya patriarki, (4) mengupayakan pengembangan kurikulum yang lebih berwawasan gender.

Usulan pengintegrasian gender dalam pendidikan FEMA – IPB:

- (1) Mengembangkan komunikasi-informasi-edukasi responsif gender melalui diskusi-diskusi di lingkungan akademisi maupun bersama masyarakat sekitar mengintegrasikan gender dalam
- (2) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Menyusun data terpilah gender dalam setiap laporan kegiatan.
- (4) Meningkatkan akses pada informasi pelatihan-pelatihan, pengembangan keterampilan, beasiswa sekolah baik bagi mahasiswa maupun dosen.
- (5) Menyediakan sistem pendukung pendidikan untuk seluruh civitas akademika (pelayanan asrama yang memenuhi kebutuhan berbeda antara laki-laki dan perempuan, keamanan di lingkungan kampus bagi perempuan, pusat informasi kesehatan reproduksi).
- (6) Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sehingga masyarakat dapat menilai bahwa pendidikan dapat memberikan nilai tambah yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
- (7) Melakukan revisi terhadap semua materi dan ilustrasi bahan ajar yang belum tanggap gender, yang diperlukan untuk menanamkan pengetahuan tentang kesetaraan dan keadilan gender pada anak sejak dini.
- (8) Meningkatkan kemampuan kelembagaan pendidikan dalam mengelola dan mempromosikan pendidikan yang berwawasan gender.

PUSTAKA

- ADB, 2005. Mengapa Gender Penting dalam Proyek-Proyek Pendidikan? <http://www.adb.org>
- Arivia, Gadis. 2002. Mengapa Perempuan Dipentingkan dalam Pendidikan? dalam Perspektif Gender dalam Pendidikan. Jurnal Perempuan no 23. Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias, 2006. Kebijakan dan Strategi Mengedepankan Kesetaraan Gender dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD-Nias.
- Bappenas, 2006. Bab 26. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas. <http://www.bappenas.go.id>
- Departemen Dalam Negeri, 2003. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.123 tahun 2003. tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.
- Departemen Kehutanan, 2004. Panduan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Departemen Kehutanan. Jakarta.

- Depdiknas, 2004. Pedoman Pelaksanaan Studi Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender. Ditjen Pendidikan Masyarakat. Jakarta.
- Diknas, 2004. Matriks Kebijakan dan Arah Program Pembangunan Pendidikan <http://www.diknas.go.id>
- Efendi, Sofian. 2007. Indonesia Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi. <http://lib.ugm.ac.id>
- Fakultas Ekologi Manusia. 2006. Rencana Strategis Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.
- Herrick, Bruce dan Charles P. Kindlebcrger. 1988. Ekonomi Pembangunan. Penerbit Bina Aksara. Jakarta.
- Husodo, Siswono Yudo. 2006. Pangan, Kualitas SDM, dan Kemajuan Suatu Negara Bangsa. dalam Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2002. Buku 1, Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Edisi ke-2, Apa Itu Gender.
- _____, 2002, Buku 2, Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Edisi ke-2, Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender.
- _____, 2002, Buku 3, Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Edisi ke-2, Perencanaan erperspektif Gender.
- Munasinghe, M.1993. Environmental Economic and Sustainable Development. The International Bank for Reconstruction and Development/THE WORLD BANK. Washington, D.C. 20433, U.S.A
- Mattjik, Ahmad Ansori. 2007. Pidato Rektor IPB pada Upacara Wisuda Tahap II tahun akademik 2006/2007. dalam Wisuda Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma tahap II tahun akademik 2006/2007 IPB.
- Todaro, Michael. 1997. Ekonomi Pembangunan.
- UNDP, 2005. Laporan Perkembangan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Indonesia. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. <http://www.undp.or.id/pubs>
- _____, 2006. Human Development Report 2006. <http://hdr.undp/org>
- Yurliani dkk, 2004. Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Provinsi Kalimantan Selatan. Pusat Studi Gender Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.